BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Mengikuti pendapat Soetandyo Wignyoebroto.³²⁵ ada lima konsep hukum, yaitu:

1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal;
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional;
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto*, dan tersistematisasi sebagai *judge made law*;
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik;
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka.

Dari 5 (lima) konsep hukum diatas, penelitian ini mengambil konsep hukum sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Jika hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional, maka metode penelitiannya adalah penelitian hukum doktrinal, atau penelitian hukum normatif.

Penelitian doktrinal ini digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam hubungan ini menggunakan logika deduktif. Logika deduktif digunakan untuk menarik

³²⁵ Soetandyo Wignyoebroto dalam Setiono, *Pemahaman terhadap metodologi penelitian hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2005, hlm.20. *commit to user*

kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual³²⁶.

Dalam kaitannya dengan penelitian doktrinal disini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah. Selain itu juga digunakan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan berkembang pengaturan isu yang dihadapi³²⁷.

Menurut Suryono Sukanto, penelitian hukum normative atau kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistemik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah.³²⁸

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan asas-asas hukum, pendekatan sistematika peraturan perundang-undangan, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal, dan sejarah. Ketiga pendekatan diatas akan diaplikasikan dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

1. Pendekatan asas-asas hukum. Dilakukan dengan cara menafsirkan kaidah-kaidah hukum yang dirumuskan dalam UU No 32/2004

³²⁶Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 242.

³²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 93-95.

³²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 13-14.

Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam setiap system hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan.³²⁹

2. Pendekatan sistematika peraturan perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan meneliti sistematika peraturan perundang-undangan adalah peneliti meneliti peraturan perundang-undangan tertentu, di sini peneliti tidak meninjau peraturan perundang-undangan dari sudut penyusunannya secara teknis akan tetapi yang ditelaahnya adalah pengertian-pengertian dasar dari system hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Analisa hanya dilakukan terhadap pasal-pasal yang isinya merupakan kaedah hukum. Setelah dilakukan analisa, maka konstruksi dilaksanakan dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu, ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari system hukum tersebut.³³⁰

Adapun penelaahan yang dilakukan dengan cara menelaah pengertian pokok atau dasar dan pasal-pasal dalam UU No 32/2004 Tentang pemerintahan Daerah.

3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan.

³²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, liberty, Yogyakarta, 1996, hlm 5-6.

³³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 255.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian ini dapat dilakukan atas dasar paling sedikit dua titik tolak, yakni taraf sinkronisasi secara vertical dan secara horizontal. Apabila titik tolak vertical yang diambil, maka yang diteliti adalah taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan menurut hirarkinya. Apabila penelitian dilakukan terhadap taraf sinkronisasi secara horizontal, maka yang diteliti adalah sampai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur pelbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsional adalah konsisten.³³¹ Sebagai dasar dari penelitian taraf sinkronisasi secara vertical, dapat diambil beberapa azas dari perundang-undangan. Sebagaimana diketahui, maka azas-azas perundang-undangan, adalah sebagai berikut:³³²

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut
- b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula,
- c. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika undang-undang tersebut kedudukannya sama. (*lex specialis derogate legi generalis*).
- d. Undang-undang yang berlaku kemudian, membatalkan undang-undang yang terdahulu, sejauh mengatur hal yang sama (*lex posterior derogate legi priori*).

³³¹ *Ibid* hlm 256

³³² Hasanuddin AF (et al), *Pengantar Ilmu Hukum*, Kerjasama antara pustaka Al Husna Baru dengan UIN Press, Jakarta, 2004, hlm 164.

Beberapa di antara azas-azas tersebut diatas, dapat diterapkan di dalam penelitian untuk mengidentifikasi taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertical. Bahkan di Indonesia, sudah ada UU No 12/2011 tentang hierarkhi peraturan perundang-undangan. Dengan mempergunakan UU tersebut, aneka macam peraturan perundang-undangan mengenai suatu bidang tertentu, dapat diteliti keserasian dan konsistensinya dalam kerangka yang hierarkhis. Disamping itu dapat pula diketahui apakah peraturan perundang-undangan dari suatu bidang tertentu, benar-benar mengikuti hierarkhi yang ditentukan UU tersebut diatas atau tidak.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan taraf sinkronisasi secara vertical dengan menerapkan salah satu azas perundang-undangan yaitu Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula yaitu UU No 32/2004 dengan peraturan perundang-undangan dibawahnya yang merupakan pelaksana dari UU No 32/2004 yaitu PP No 38/2007, PP No 79/2005.

4. Sejarah Hukum

Menurut Soerjono Soekanto³³³ salah satu kegunaan dari penggunaan metode sejarah adalah untuk dapat mengungkapkan fakta hukum pada masa lampau, dalam hubungannya dengan fakta hukum pada masa kini. Hukum masa kini merupakan hasil perkembangan dari salah satu aspek kehidupan manusia pada masa

commit to user

³³³ *Ibid* hlm 263-264.

lampau dan hukum masa kini merupakan dasar bagi hukum pada masa-masa mendatang. Sejarah hukum bukan semata-mata merupakan kronologi dari peristiwa-peristiwa hukum pada masa lampau. Sejarah hukum merupakan suatu penelitian terhadap khronologi peristiwa-peristiwa hukum pada masa lampau yang menyebabkan terjadinya gejala hukum tertentu, akibatnya dan seterusnya, pada masa kini. Pada penelitian ini sejarah hukum yang digunakan selain kronologi peristiwa masa lampau adalah beberapa peraturan masa lampau yaitu Pasal 18 dan penjelasannya UUD 1945, Pasal 18 Amandemen UUDNRI 1945, Ketetapan MPR No XV/MPR/1998, Ketetapan MPR No XXI/MPR/1966, UU No 22/1999, , Ketetapan MPR No IV/MPR/2000, , UU No 18/2001, UU No 21/2001, UU No 44/1999, UU No 23/1997.

Penulis juga menggunakan pendekatan Hermeneutic. Pendekatan hermeunetik akan dimanfaatkan sebagai pisau analisis dalam rangka melakukan studi terhadap teks aturan hukum abstrak dalam bidang otonomi daerah.

Dalam rangka melengkapi pada level operasional dalam penelitian ini, maka pendekatan hermeneutic adalah sebagai kelengkapan analisis terhadap teks aturan perundangan, sebagaimana pendapat Stephen W Little John³³⁴ yang menguraikan bahwa hermeneutic adalah suatu cara analisis fenomena social dengan tafsir tindakan atau teks, seperti tafsir kitab suci yang disebut eksegenesis, tafsir sastra disebut filologi, dan tafsir manusia dan tindakan social disebut social hermeneutic.

commit to user

³³⁴ Andrik Purwasito, *Komunikasi multicultural*, UMS Pers, 1993, hlm 237.

Penafsiran hukum (interpretasi hukum) adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasarkan pada kaitannya. Adapun beberapa metode penafsiran hukum ini, adalah sebagai berikut:³³⁵

1. Interpretasi tata bahasa, yaitu cara penafsiran berdasarkan bunyi ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada arti yang dipakai oleh undang-undang. Yang dianut arti perkataan menurut kebiasaan sehari-hari adalah kebiasaan sehari-hari. Contoh suatu peraturan melarang orang memarkirkan kendaraannya di suatu tempat tertentu;
2. Interpretasi sistematis, yaitu cara penafsiran dengan melihat susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang tersebut maupun dengan undang-undang yang lain. Contoh asas monogami dalam pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH. Perdata) menjadi dasar pada pasal 34,60,86, dan 279 KUH. Perdata;
3. Interpretasi Sahih, yaitu cara penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata tersebut sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri. Misal pasal 98 KUHP, dinyatakan malam, hal ini yang dimaksud adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, juga yang dimaksud dengan ternak adalah hewan berkuku satu, mama biak dan babi;
4. Interpretasi Historis meliputi, yaitu :
 - a. Sejarah hukumnya yaitu cara penafsiran dengan menyelidiki sejarah terjadinya hukum tersebut; dan
 - b. Sejarah Undang-undang yaitu cara penafsiran dengan menyelidiki pembentuk undang-undang pada waktu membuat undang-undang.

Contoh seseorang yang melanggar hukum didenda sebesar Rp. 400,-, maka denda sebesar itu jika diterapkan zaman sekarang jelas tidak

³³⁵ Hasanuddin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Al Husna Baru, Jakarta, 2004, hlm 166-167.

sesuai, oleh karena itu harus ditafsirkan sesuai dengan keadaan harga sekarang ini.

5. Interpretasi Ekstensif, yaitu cara penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan. Contoh aliran listrik termasuk benda;
6. Interpretasi Nasional, yaitu cara penafsiran dengan menilik sesuai tidaknya dengan sistem hukum yang berlaku. Contoh pasal 570 KUH. Perdata sekarang harus ditafsirkan menurut hak milik yang sesuai dengan hukum Indonesia yaitu pasal 20 ayat 1 Undang-undang Pokok Agraria;
7. Interpretasi Teologis (sosiologis), yaitu cara penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang. Contoh walaupun suatu undang-undang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan akan tetapi jika undang-undang itu masih berlaku, maka tetap diterapkan terhadap kejadian atau peristiwa masa sekarang;
8. Interpretasi Restriktif, yaitu cara penafsiran dengan membatasi arti kata dalam peraturan itu sendiri. Contoh kerugian tidak termasuk kerugian yang tidak berwujud seperti sakit, cacat.
9. Interpretasi Analogi, yaitu cara penafsiran pada peraturan hukum dengan asas hukum sehingga sesuatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Contoh menyambung aliran listrik dianggap sama dengan aliran listrik.
10. Interpretasi A Contrario, yaitu suatu cara menafsirkan undang-undang dengan mendasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam pasal undang-undang tersebut. Contoh pasal 34 KUH. Perdata menyatakan bahwa seseorang perempuan tidak diperkenankan menikah lagi sebelum lewat 300 hari setelah perkawinan terdahulu diputuskan.

Dalam penelitian disertasi ini menggunakan interpretasi tata bahasa, interpretasi sistematis dan interpretasi sejarah. Interpretasi bahasa yaitu bunyi ketentuan UU No 32/2004, interpretasi sistematis yaitu menfasirkan bunyi pasal-pasal dalam UU No 32/2004 dan interpretasi sejarah yaitu dengan melakukan penyelidikan sejarah terjadinya peraturan-peraturan pemerintahan daerah pada masa lalu dan menyelidiki pembentuk undang-undang pada waktu membuat undang-undang.

Hermeneutika hukum menurut Jazim Hamidi bermakna ajaran filsafat mengenai hal mengerti/memahami sesuatu, atau sebuah metode interpretasi (penafsiran) terhadap suatu teks yang ada kaitannya dengan masalah hukum, ataupun berupa peristiwa hukum, fakta hukum dan hasil ijtihad para ahli hukum (doktrin).³³⁶ Walaupun metode ini sesungguhnya telah sangat tua karena Aristoteles (384-322 SM) telah menyampaikan teori dan penerapannya yang kemudian baik oleh dua agama besar, agama islam maupun kristiani juga mengembangkan metode ini untuk mempelajari teks agama dari kitab sucinya. Kemudian pada era modern filsafat hermeneutika dikembangkan oleh Ricouer, Heidegger, Hans Georg Gadamer dan sebagainya yang menganalogkan metode keilmualan dengan humaniora yang menurut Gregory Leyh, hermeneutika hukum dalam kenyataannya bukanlah merupakan suatu kasus yang khusus/baru, tetapi sebaliknya ia hanya merekonstruksikan kembali dari seluruh problema hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, dimana ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora/ilmu

³³⁶ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Hukum dengan Interpretasi Teks*, Cetakan Pertama, Universitas Islam Indonesia (UII) Press, Yogyakarta, 2005, hlm viii.

kemanusiaan³³⁷ Beberapa variable yang menjadi penyebab mengapa kemudian antara norma dipahami secara berbeda atau berlainan, yakni sebagai berikut:

- a. Keputusan hakim yang berpengaruh praktis terhadap kehidupan masyarakat, sehingga agar benar diaplikasikan harus diinterpretasikan secara benar.
- b. Sejarahwan hukum harus melakukan suatu evaluasi historis atas kaidah hukum yang harus dipahami secara benar, yang bersangkutan harus mampu memberi makna historic dari suatu norma hukum.³³⁸
- c. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menurut pandangan penulis juga memiliki peran sentral, khususnya dalam memaknai teks norma hukum otonomi daerah. Dalam realita dibuktikan dengan ketentuan menurut UU No 32/2004 tentang kewenangan dan pengawasan yang merupakan indicator menguatkan Negara kesatuan republic Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa aspek hermeneutika hukum bertugas mengkaji, menganalisis, serta membuat simpulan keterkaitan antara teks, konteks serta kontekstualisasi suatu kaidah hukum.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dengan mengambil data di Perpustakaan yaitu perpustakaan UNS, perpustakaan UMS, perpustakaan UII, perpustakaan Pascasarjana UNS, Sekretariat Negara dan mengambil data di lapangan yaitu di fakultas hukum UMS.

C. Sumber Data

Sumber data yang peneliti ambil adalah data primer dan data sekunder. Menurut S Nasution data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian³³⁹. Penulis menggunakan data primer untuk mendapatkan informasi langsung yaitu dengan menggunakan metode FGD (*Focus Group Discussion*). FGD adalah suatu metode riset yang didefinisikan

³³⁷ *Ibid*, hlm 42.

³³⁸ *Ibid*, hlm 44.

³³⁹ Nasution, M.A.,S, *Asas-asas Kurikulum*, Penerbit Terate, Bandung, 1964, hlm 34.

sebagai “suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok”.³⁴⁰ Peserta FGD terdiri dari beberapa kalangan akademisi dan praktisi pemerintahan.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto³⁴¹ data sekunder digunakan dalam penelitian yang mencakup tiga bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis. Dalam hal ini bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah UUD 1945 meliputi UUD 1945 dan Penjelasannya dan UUD 1945 yang sudah diamandemen tahun 1999-2002, UU No 5 Tahun 1974, UU No 22/1999 dan UU No 32/2004, Tap MPR RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN, Tap MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, UU No 44/1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh juncto UU No. 18/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi Naggroe Aceh Darussalam juncto UU

³⁴⁰ Irwanto, *Focus Group Discussion*, Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat, 1988, hlm 1.

³⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 52.

- No. 11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh, UU No 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.
2. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu pendapat para ahli, artikel media massa dan teori hukum dari para ahli hukum. Bahan hukum primer yang penulis gunakan meliputi: teori hukum menurut CF Strong, teori hukum menurut Hans Kelsen, teori hukum menurut Nikmatul Huda, teori hukum menurut Ramlan Surbakti.
 3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang dapat memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

D. Analisis Data

Untuk menganalisis data terlebih dahulu dilakukan inventarisasi peraturan, peraturan-peraturan yang penulis gunakan adalah mulai dari UUD 1945, TAP MPR No XXI/MPR/1966, TAP MPR No XV/MPR/1998, TAP MPR No. IV/MPR/1999, TAP MPR No IV/MPR/2000, UU No 23/1997, UU No 22/1999, UU No 44/1999, UU No 18/2001, UU No 21/2001, UU No 32/2004, UU No 13/2012, PP No 38/2007, PP No 79/2005, Permendagri No 23/2007, Permendagri No 53/2007 dan juga mengumpulkan informasi dari hasil FGD.

Penafsiran yang penulis gunakan adalah penafsiran tata bahasa, penafsiran sistematis, penafsiran sah, penafsiran historis, penafsiran *commit to user*

ekstensif, penafsiran nasional, penafsiran teologis, penafsiran restriktif, penafsiran analogi, penafsiran a contrario.

Dengan memperhatikan penelitian hukum normative, penafsiran hukum yang dilakukan serta dengan menggunakan pendekatan asas-asas hukum, sistematika peraturan perundang-undangan, penelitian terhadap taraf sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sejarah hukum maka analisis menggunakan logika deduksi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan logika deduksi. Logika deduksi yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Permasalahan umum dari penelitian yang penulis akan angkat adalah bahwa hakikat negara kesatuan adalah Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan perkataan lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi, jadi adanya kewenangan untuk membuat peraturan bagi daerahnya sendiri tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah itu berdaulat, sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi masih tetap terletak di tangan pemerintah pusat.

Sedangkan ketentuan tentang kewenangan dan pengawasan menurut UU No 32/2004 dalam menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah terkait dengan kewenangan, pada intinya menyebutkan bahwa

pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten dan kota menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan menjalankan otonomi seluas-luasnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, urusan yang diselenggarakan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan secara *concurrent*, terkait dengan pengawasan bahwa salah satu pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah

Sehingga dari permasalahan umum dan permasalahan khusus diatas dapat penulis gunakan untuk menganalisis apakah ketentuan menurut UU No 32/2004 tentang kewenangan dan penafsiran mengandung penafsiran yang cenderung mengarah pada tidak menguatkan negara kesatuan yaitu tidak menguatkan kearah federalisme dan tidak menguatkan kearah resentralisasi. Adapun indikator menguatkan adalah pada kewenangan dan pengawasan.